

Judul : Perkara Suap Anggota KPU RI : KPK Terus Memburu Harun Masiku
Tanggal : Jumat, 31 Desember 2021
Surat Kabar : Bisnis Indonesia
Halaman : 6

| PERKARA SUAP ANGGOTA KPU RI |

KPK TERUS MEMBURU HARUN MASIKU

Bisnis, JAKARTA — Keberadaan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Harun Masiku hingga pengujung 2021 belum ditemukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tersangka dugaan korupsi pergantian antar waktu anggota DPR periode 2019–2024 tersebut bakal diburu sampai ketemu.

Jaffry Prabu Prakoso
jaffry.prakoso@bisnis.com

Harun Masiku menghilang sejak awal 2020 setelah ditetapkan sebagai salah satu terduga korupsi pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR periode 2019–2024.

Dia merupakan bekas calon tersangka suap kepada Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan. Harun diduga menyuap Wahyu untuk memuluskan jalannya menjadi anggota DPR lewat PAW.

Suap yang dilakukan oleh Harun Masiku kepada Wahyu Setiawan senilai Rp600 juta melibatkan kader PDIP Sakti Bahr yang kini sudah menjalani proses hukum dan divonis hukuman 20 bulan penjara.

Uang suap tersebut diberikan kepada Wahyu untuk mengupayakan agar KPU menyetujui PAW dari Riezky Aprilia sebagai anggota DPR daerah pemilihan Sumatra

Selatan 1 kepada Harun Masiku. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan sejauh ini belum ada informasi keberadaan Harun Masiku yang diperoleh pimpinan lembaga tersebut.

Menurutnya, KPK berjanji akan terus mencari dan mengejar Harun, bahkan jika yang bersangkutan tidak ada di Indonesia bakal diburu.

"Misalnya kalau yang bersangkutan ada di luar negeri, ya kami pasti akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum setempat. Samalah kasusnya dulu, Nazaruddin (eks Bendahara Umum Partai Demokrat)," ujar Alex, Kamis (30/12).

Harun Masiku hilang tidak berbekas seusi ditetapkan sebagai tersangka kasus suap pimpinan KPU, padahal lembaga antirasuah tersebut dibekali kelengkapan alat mutakhir dan undang-undang yang cukup superior.

KPK masih tidak mampu menangkap politisi kelas teri tersebut. Malah dalam perjalanannya, Harun kerap diberitakan telah

menghilang, berada di luar negeri, bahkan jadi hantu karena ada kabar dia telah meninggal alias dienyapkan.

Penyidik KPK nonaktif Ronald Masiku berada di Indonesia pada Agustus 2021. Namun, Ronald mengaku tidak bisa menaungkannya lantaran bersitus nonaktif karena tidak lolos tes wawasan kebangsaan.

Deputi Penindakan KPK Karyoto juga pernah mengklami sudah mengetahui lokasi bunyi Masiku. Bahkan, Karyoto mengaku sangat bernas untuk mengkus manan Categ PDIP tersebut.

"Hanya saja karena tempatnya tidak di dalam negeri, mau ke sana juga bingung. Pandemi sudah berapa tahun. Saya sangat nafsu sekali ingin menangkapnya. Kalau dulu Pak Ketua sudah perintahkan, saya berangkat," ujarnya beberapa waktu lalu.

FORMULA E DIAWASI

Dalam perkembangan lain,

KPK juga terus mendalami berkas terkait Formula E yang telah diserahkan Pemerintah DKI Jakarta dan PT Jakarta Properindo (Jakpro) kepada lembaga antirasuah bulan lalu.

"Sekarang dipelajari oleh penyidik. Pasti dipelajari semua dokumen-dokumen itu terkait dengan misalnya apa benar penyelenggara di negara lain, tidak pakai *commitment fee* dan yang lainnya. Itu kan harus didalam, dikonfirmasi," ujar Alex.

Menurutnya, KPK akan mendalami terkait berapa jumlah biaya komitmen hingga dananya dikirim. Hal tersebut pasti akan digali sebagai informasi yang sifatnya mendasar.

Dijelaskan Alex bahwa perkembangan terkini pelaksanaan Formula E Jakarta 2022 sudah ditentukan lokasi berada di Ancol, Jakarta Utara, dan waktunya pada 4 Juni 2022. Oleh karena itu, anggarannya sudah harus ditentukan.

"Apakah pembiayaannya hanya

sebatas Rp500 miliar atau ada yang lain. Karena kan dari ketua panitia sendiri bilang akan menggunakan dana swasta atau sponsor. Ya kita lihat nanti," jelasnya.

Alex mengakui bahwa hingga saat ini pimpinan KPK masih belum mendapat perkembangan terbaru soal Formula E. Penyidik masih terus menggali informasi sehingga belum bisa disampaikan ke para petinggi.

"Apapun nanti hasilnya, apakah ada atau tidak ada indikasi korupsi, pasti akan kami informasikan. Kami harus *fair*. Kalau misalkan itu tidak ada indikasi korupsi, ya harus kita sampaikan. Kan gitu."

Sebelumnya dalam penyerahan dokumen Formula E sebetul 600 halaman kepada KPK, Pemprov DKI Jakarta dan PT Jakarta Properindo (Jakpro) didampingi oleh dua pimpinan KPK periode 2011–2015 Bambang Widjojanito dan Adnan Pandu Praja. Bambang mengatakan langkah partisipatif Pemprov DKI harus didukung.